

SKRIPSI

**ANALISIS PENGARUH PENERIMAAN PAJAK TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2015-2024 MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**



Disusun Oleh:

RAHMATUL FAHMI

NIM: 190602302

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rahmatul Fahmi

NIM : 190602302

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 1 September 2025

Yang Menyatakan



Rahmatul Fahmi



PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2024 Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

Rahmatul Fahmi
NIM: 190602302

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Ayumiati, SE., M.Si., CTTr
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II



Azimah Dianah, S.E., M. Si., Ak
NIP.198802262023212035

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si
NIP. 197612172009122001

Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2024 Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Telah disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Ketua

Azimah Dianah, S.E., M. Si., Ak
NIP.198802262023212035

Penguji II

Eka Octavian Pranata, S.E., M.Si
NIP. 199810092024031001

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009



FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Rahmatul Fahmi
NIM : 190602302
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 190602302@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☒ Skripsi

yang berjudul

"Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2024 Menurut Perspektif Ekonomi Islam."

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di **A R : Banda Aceh R Y**

Pada tanggal :

Mengetahui

Penulis

Rahmatul Fahmi
NIM. 190602302

Pembimbing I

Dr. Ayumiati, SE., M.Si., CTr.
NIP. 197806152009122002

Pembimbing II

Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 198802262023212035

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

” Ilmu adalah cahaya yang menuntun langkah, amal adalah bekal yang meneguhkan hati.”

-Rahmatul Fahmi

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

”Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah [94] : 56)

“Barang siapa menempuh jalan ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju kebaikan”

(HR. Muslim)

”Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil’alamin dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, keluarga, sahabat, dosen pembimbing, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan serta doa hingga terselesaikannya karya ini.”

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2024 Menurut Perspektif Ekonomi Islam"**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju era yang penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan Muksal, S.E.I., M.E.I. selaku Sekretaris Program Ekonomi Syariah.
3. Hafiih Maulana, SP., S.HI., M.E., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Ayumiati, S.E., M.Si., CTr. selaku Pembimbing I, dan Azimah Dianah, S.E., M.Si., AK, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan arahan, serta meluangkan waktu dan pikiran untuk penulis.
5. Tim penguji, (penguji 1) dan (penguji 2), yang telah memberikan masukan berharga pada sidang skripsi ini.
6. Dr. Nilam Sari, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan saran, bimbingan, dan dukungan selama masa studi.
7. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan bantuan selama penulis menjalani masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta, alm. Ayahanda Jauhari Adam dan Ibunda Dian Roslina, yang dengan penuh kasih sayang, doa, pengorbanan, motivasi, dan dukungan, baik moral maupun material, menjadi inspirasi terbesar bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik, Dila, Amar Shalihan, Saddam Hussein, Heru Hermawan dll yang selalu menemani, membantu, dan memberikan semangat selama proses

penyusunan skripsi ini.

10. Kakak dan adik tercinta, Ridha Aufa, Nadia Safira, Putri Riska, Riski Ananda yang senantiasa mendukung, memberikan bantuan, dan menyemangati penulis.
11. Teman-teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dalam bidang Ekonomi Syariah pada umumnya dan yang terkait hasil penelitian dalam penulisan skripsi ini pada khususnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2026

Penulis

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Rahmatul Fahmi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul
Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Rahmatul Fahmi
NIM : 190602302
Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh
Tahun 2015-2024 Menurut Perspektif
Ekonomi Islam
Pembimbing I : Dr. Ayumiati, SE., M.Si., CTT.
Pembimbing II : Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh tahun 2015–2024 berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Variabel bebas penelitian ini adalah penerimaan pajak (X1), sedangkan pertumbuhan ekonomi (Y) merupakan variabel terikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, dan dianalisis menggunakan uji asumsi klasik serta uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Kota Banda Aceh tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan oleh nilai signifikansi $> 0,05$ dan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,198. Dari perspektif ekonomi Islam dan Maqashid Syariah, pajak (*dharibah*) diperbolehkan sebagai kontribusi untuk kemaslahatan umum apabila dilaksanakan secara adil, namun sistem pendapatan negara idealnya lebih menekankan zakat, infaq, sedekah, dan pengelolaan sumber daya halal untuk mencapai kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemaslahatan masyarakat. Hasil ini menunjukkan perlunya peningkatan optimalisasi pengelolaan dana publik sesuai prinsip-prinsip Islam dan Maqashid Syariah.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak, Pertumbuhan Ekonomi, Ekonomi Islam, Provinsi Aceh.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
2.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.2 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi	15
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.4 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi.....	19
2.1.5 Indikator Pertumbuhan Ekonomi	20
2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	21
2.2 Pajak.....	23
2.2.1 Pengertian Pajak.....	23
2.2.2 Jenis-Jenis Pajak	25
2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota.....	27
2.2.4 Fungsi Paak	29

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	30
2.2.6 Dasar Hukum Pajak	31
2.2.7 Indikator Penerimaan Pajak	33
2.2.8 Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam	35
2.2.9 Teori Maqasid Syariah dalam Pengelolaan Pajak	37
2.3 Penelitian Terkait	38
2.4 Kerangka Berpikir.....	48
2.4.1 Hubungan Antar Variabel Penelitian	48
2.4.2 Model Kerangka Berpikir Penelitian	50
2.5 Hipotesis Penelitian.....	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	52
3.1 Desain Penelitian.....	52
3.2 Lokasi Penelitian.....	52
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	53
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.5 Populasi dan Sampel Penelitian	54
3.6 Variabel Penelitian	54
3.7 Definisi Operasional Variabel.....	55
3.8 Uji Asumsi Klasik.....	55
3.8.1 Uji Normalitas.....	55
3.8.2 Uji Heterokedastisitas	56
3.9 Metode Analisis Data.....	57
3.10 Pengujian Hipotesis.....	58
3.10.1 Uji Parsial (Uji t).....	58
3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
4.1.1 Peta Kota Banda Aceh	60
4.1.2 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh.....	61
4.2 Gambaran Umum Data Penelitian	62
4.3 Uji Asumsi Klasik.....	65
4.3.1 Uji Normalitas.....	65
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	67
4.4 Uji Hipotesis	71
4.4.1 Uji Normalitas.....	71
4.4.2 Koefisien Determinas (R).....	73

BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	80
 DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	91



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) di Indonesia Tahun 2015 - 2024	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	41
Tabel 3.1 Defenisi Operasional Variabel	51
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2024.....	57
Tabel 4.2 Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi	59
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov....	62
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64
Tabel 4.5 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana	66
Tabel 4.6 Hasil Uji t	68
Tabel 4.7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PRDB ADHK Aceh 2015 – 2024 (Dalam Juta)	5
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian	46
Gambar 4.1 Peta Kota Banda Aceh	56
Gambar 4.2 Grafik P-Plot Uji Normalitas Data	63
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Primer Penelitian	85
Lampiran 2. Output SPSS.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja dan keberhasilan suatu negara dalam mengelola kegiatan ekonominya dalam jangka pendek serta upaya pengembangan ekonomi dalam jangka panjang (Ayuningtyas, Puspita, dan Prakoso, 2023). Sukirno (2016) menjelaskan bahwa ukuran yang sering digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional rill, (Produk Domestik Bruto/PDB rill), yang mencerminkan nilai akhir dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian dalam satu tahun tertentu.

Dalam konteks nasional, perekonomian Indonesia mengalami fluktuasi sebagai akibat dari dinamika lingkungan ekonomi global dan domestik (Suriyanti dkk., 2024). Faktor domestik seperti penurunan ekspor, impor dan investasi menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan ekonomi, meskipun stabilitas permintaan domestik serta inflasi yang terkendali masih menjadi penompang utama. Dari sisi sektoral, sektor primer dan sekunder cenderung melemah, terutama dibidang pertambangan dan industri, sedangkan sektor tersier, seperti informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan asuransi, serta real estate justru mengalami pertumbuhan yang relatif kuat (BPS, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan

ekonomi tidak selalu stabil dan membutuhkan intervensi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan. (Mankiw, 2018).

Salah satu faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah penerimaan negara, terutama pajak. Pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan nasional, Menurut (Putra, 2017; Yusuf dkk., 2023) bahkan kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai lebih dari 70%. Selama lima tahun terakhir, penerimaan pajak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan signifikan berkat kebijakan peningkatan kepatuhan wajib pajak, penegakan hukum, dan digitalisasi sistem perpajakan. Data mengenai realisasi penerimaan negara di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2024

No	Tahun	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan Ekonomi
1	2015	55,81	5,00
2	2016	68,33	5,93
3	2017	70,93	3,39
4	2018	75,07	4,45
5	2019	85,24	4,13
6	2020	74,89	-3,39
7	2021	75,06	5,50
8	2022	85,53	5,23
9	2023	96,50	5,06
10	2024	118,00	6,08

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Dirjen Pajak (2026)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2015–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Penerimaan pajak mengalami peningkatan dari 55,81 miliar rupiah pada tahun 2015 menjadi 118,00 miliar rupiah pada tahun 2024, meskipun sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 74,89 miliar rupiah. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak fluktuatif, dari 5,00% pada tahun 2015, meningkat menjadi 5,93% pada tahun 2016, kemudian mengalami penurunan hingga mencapai kontraksi sebesar -3,39% pada tahun 2020, sebelum kembali meningkat menjadi 5,50% pada tahun 2021 dan mencapai 6,08% pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perubahan dari tahun ke tahun (BPS, 2024).

Dari sisi tata kelola, sistem, administrasi negara menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai aspek, seperti potensi ekonomi wilayah, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi lokal secara optimal. Pembentukan daerah otonom dilakukan berdasarkan potensi ekonomi, sosial, dan budaya yang dimiliki oleh setiap wilayah, sehingga mampu mendorong pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Konsep otonomi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Implementasi desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat kemandirian keuangan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Halim dkk., 2019; Alwiyah, 2014).

Penerimaan pajak daerah Kota Banda Aceh berasal dari beberapa jenis pajak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Di antara berbagai jenis pajak tersebut, pajak restoran merupakan salah satu penerimaan pajak yang dominan di Kota Banda Aceh. Hal ini didukung oleh berkembangnya aktivitas perdagangan dan jasa, terutama usaha rumah makan, warung kopi, kafe, dan usaha kuliner yang menjadi salah satu karakteristik kegiatan ekonomi masyarakat Kota Banda Aceh. Besarnya kontribusi pajak restoran menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas konsumsi dan usaha masyarakat dapat meningkatkan penerimaan daerah, yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, penerimaan pajak tersebut masih perlu dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data

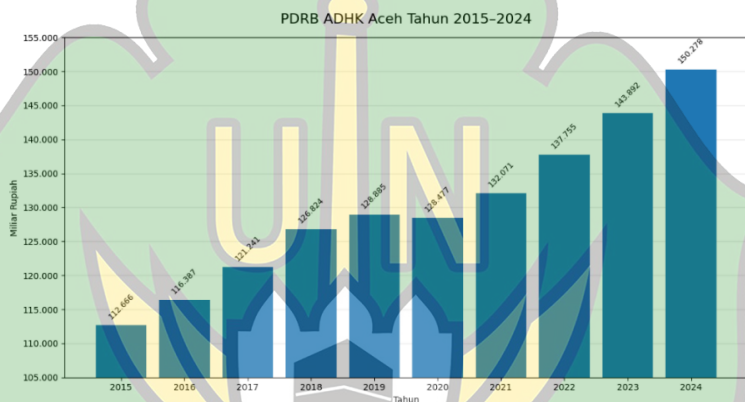
objek pajak, penguatan pengawasan, serta digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah (Pemerintah Kota Banda Aceh, 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, pajak dapat diterima sebagai kewajiban kepada negara sepanjang pemungutannya dilakukan secara adil, tidak memberatkan masyarakat, dan digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Pajak memiliki keterkaitan dengan tujuan maqasid syariah karena penerimaannya dapat dialokasikan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan berbagai pelayanan publik yang mendukung perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pajak berbeda dengan zakat dalam hal dasar hukum, objek, tarif, dan pihak penerima, tetapi keduanya memiliki kesamaan sebagai instrumen untuk mendukung kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam konteks Kota Banda Aceh, pengelolaan penerimaan pajak harus berlandaskan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan pertanggungjawaban agar penerimaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam (Syarif, 2021; Haafiz, 2024; Wahyuni dkk., 2024).

Aceh sebagai daerah otonomi khusus memiliki posisi penting dalam kajian pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Aceh diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang meski menunjukkan peningkatan dari 2019 hingga 2023, masih tertinggal dibandingkan Provinsi lain di Sumatera (Miswar dkk.,

2021; Nisa dkk., 2025). Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Aceh cenderung stagnan dibawah 5% meskipun APBA relatif besar.

Berikut adalah diagram pertumbuhan ekonomi Aceh yang diukur dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada periode tahun 2019 sampai dengan 2023.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Gambar 1.1
PDRB ADHK Aceh 2015 – 2024 (Dalam Miliar)

Berdasarkan Gambar 1.1, nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan atau PDRB ADHK Provinsi Aceh selama periode 2015–2024 secara umum menunjukkan tren peningkatan. Nilai PDRB ADHK meningkat dari sekitar Rp112.666 miliar pada tahun 2015 menjadi Rp150.278 miliar pada tahun 2024. Meskipun demikian, pada tahun 2020 terjadi penurunan dari Rp128.885 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp128.477 miliar sebagai dampak dari perlambatan aktivitas ekonomi selama pandemi

COVID-19. Setelah tahun 2020, perekonomian Aceh kembali mengalami pemulihan, yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB ADHK secara berturut-turut pada tahun 2021 hingga 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas produksi barang dan jasa di Provinsi Aceh mengalami perkembangan positif dalam jangka panjang, meskipun sempat mengalami kontraksi pada tahun 2020.

Di sisi lain, penerimaan pajak daerah di Provinsi Aceh menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan pajak daerah tercatat sebesar Rp1,53 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp1,54 triliun pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kemampuan Pemerintah Aceh dalam merealisasikan penerimaan yang bersumber dari pajak daerah (Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, 2023). Sementara itu, di tingkat kota, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Banda Aceh mencapai Rp70.931.534,36. Angka ini meningkat pada tahun 2018 menjadi Rp75.068.844,42. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak daerah Kota Banda Aceh, meskipun kenaikan penerimaan pajak tersebut belum dapat secara langsung diartikan sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa melalui pengujian lebih lanjut (BPS Kota Banda Aceh, 2021).

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara visi pemerintah dan praktik masyarakat, yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Hal inilah yang menjadi alasan kuat mengapa Kota Banda Aceh layak diteliti dalam penelitian ini, karena fenomena ini menunjukkan adanya gap yang relevan untuk dikaji lebih mendalam.

Penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa pajak memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Utamia & Masyitah (2023) menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh pada periode 2011-2020. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Romdani et al. (2017) menunjukkan bahwa pajak daerah juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada periode 2012-2015.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa perbedaan dalam ruang lingkup dan periode penelitian. Penelitian ini berfokus pada pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh pada periode 2015-2024. Berbeda dengan penelitian Utamia & Masyitah (2023) yang meneliti hubungan pajak dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat provinsi Aceh dalam jangka waktu 2011-2020, serta penelitian Romdani et al. (2017) yang mengkaji aspek serupa di Provinsi Jambi.

Berdasarkan latar belakang tersebut serta adanya kesenjangan penelitian (*research gap*), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: **“Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh Tahun 2015-2024 Menurut Perspektif Ekonomi Islam.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh tahun 2015-2024 menurut perspektif ekonomi islam?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh tahun 2015-2024 menurut perspektif ekonomi islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dan pihak terkait dalam memahami pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh (2015-2024) dalam perspektif ekonomi Islam. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu manfaat teoritis dan praktis serta kebijakan:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Kontribusi terhadap literatur tentang pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Pengembangan pemahaman tentang bagaimana penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh yang dapat menjadi landasan bagi penelitian dan pengembangan lebih lanjut di bidang ini.

3. Peningkatan pengetahuan tentang pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh, khususnya dalam perspektif ekonomi Islam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan wawasan serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah, terutama Kota Banda Aceh, dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.
2. Memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan dalam memahami pentingnya pajak sebagai instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.
3. Bagi pelaku bisnis, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana ekonomi Islam memandang peran pajak, yang dapat memengaruhi keputusan bisnis mereka terkait kepatuhan pajak dan tanggung jawab sosial.

1.4.3 Manfaat Kebijakan

1. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan perpajakan yang lebih optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat serta keadilan distribusi.

3. Mendorong integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam kebijakan perpajakan guna menciptakan sistem yang lebih inklusif dan mendukung keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai isi skripsi, dengan susunan yang sistematis dan komprehensif. Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: bab ini menyajikan pendahuluan, yang memaparkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II landasan teori: bab ini menyajikan kajian literatur terkait konsep-konsep, teori-teori, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi serta perspektif ekonomi Islam.

Bab III metode penelitian: bagian ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.

Bab IV hasil dan pembahasan: bab ini memaparkan temuan-temuan dari penelitian berdasarkan data yang diperoleh, serta menganalisis dan mendiskusikan hasil tersebut dalam konteks teori dan literatur yang relevan.

Bab V kesimpulan dan saran: bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian, baik untuk penelitian lanjutan maupun untuk praktisi terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.1 Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Liana dkk. (2024), pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan indikator perkembangan aktivitas ekonomi yang berdampak pada peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan peningkatan kapasitas produksi dalam suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional.

Wardani dkk. (2024) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses jangka panjang yang berfokus pada peningkatan output per kapita. Dalam konsep ini, terdapat tiga aspek utama yang menjadi perhatian, yaitu proses pertumbuhan itu sendiri, peningkatan output per kapita, dan jangka waktu pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menggambarkan kondisi ekonomi pada satu waktu tertentu, tetapi lebih menitikberatkan pada dinamika perubahan ekonomi dari waktu ke waktu.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi dapat memiliki dua implikasi, yaitu positif dan negatif. Ketika ekonomi tumbuh, hal ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang baik. Sebaliknya, jika mengalami penurunan, maka kondisi ekonomi dianggap kurang stabil. Amalia dkk. (2022) menyatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi suatu negara menunjukkan kemampuannya dalam meningkatkan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat secara berkelanjutan. Pencapaian ini didukung oleh kemajuan teknologi, penguatan kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang diperlukan agar sumber daya produksi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan output nasional.

Saragih (2018) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kapasitas suatu negara atau daerah dalam memproduksi barang dan jasa dari waktu ke waktu. Pengukuran pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, PDRB merupakan total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Nilai tambah ini diperoleh dari selisih antara nilai produksi dan biaya input, mencakup pendapatan faktor produksi, penyusutan, serta pajak tidak langsung neto. Dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari berbagai sektor, diperoleh angka PDRB suatu daerah.

Keberhasilan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Perekonomian suatu daerah cenderung mengalami peningkatan seiring bertambahnya faktor produksi dan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam proses ekonomi (Sukirno, 2012). Boediono (2016) juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan output per kapita yang

mencerminkan perkembangan ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kapasitas produksi suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa secara berkelanjutan. Pertumbuhan ini diukur melalui peningkatan output per kapita dan mencerminkan perkembangan ekonomi yang didukung oleh inovasi teknologi, pemanfaatan tenaga kerja secara optimal, serta efisiensi dalam penggunaan faktor produksi. Secara umum, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan positif dalam produktivitas ekonomi, meskipun dalam beberapa kondisi tertentu, juga dapat mencerminkan penurunan apabila terjadi kontraksi ekonomi.

2.1.2 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan rakyatnya. Sukirno (2016) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja, termasuk keterampilan, pendidikan, dan kesehatan, sangat berpengaruh terhadap produktivitas suatu negara. SDM yang berkualitas dapat meningkatkan efisiensi dan inovasi dalam proses produksi.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

SDA meliputi kekayaan alam yang dimiliki suatu negara, seperti minyak, gas, mineral, air, dan tanah subur. Ketersediaan dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan bahan baku dan energi untuk produksi.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berperan penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teknologi yang lebih baik dapat meningkatkan efisiensi produksi, menghasilkan inovasi produk, serta memperluas akses pasar, sehingga meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara.

d. Budaya

Faktor budaya, seperti etos kerja, sikap terhadap inovasi, dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola sumber daya, juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Budaya yang mendorong kerja keras, kreativitas, dan kerjasama dapat mempercepat kemajuan ekonomi.

e. Sumber Daya Modal

Modal adalah faktor penting dalam meningkatkan kapasitas produksi. Investasi dalam bentuk modal fisik (mesin, bangunan, infrastruktur) dan modal finansial (dana) membantu memperluas skala produksi, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan sumber daya

modal yang baik sangat penting untuk keberlangsungan pertumbuhan ekonomi.

Hasyim (2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu:

1. Faktor Penawaran, yaitu: sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), stok modal, kewirausahaan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi (IpTek). Kelima kategori ini mencerminkan barang dan jasa yang ditawarkan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Faktor Permintaan, pertumbuhan ekonomi di pasar bebas tidak dapat tercapai tanpa adanya permintaan terhadap barang dan jasa. Tingginya permintaan akan barang dan jasa dapat mendorong peningkatan produktivitas. Produktivitas yang baik akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara.
3. Faktor Non-Ekonomi, meliputi kebudayaan, agama, dan tradisi. Ketiga elemen ini dapat mempengaruhi perkembangan perekonomian. Budaya yang mendorong pembangunan, seperti sikap kerja keras, jujur, ulet, dan cerdas, akan berkontribusi pada peningkatan ekonomi.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan output per kapita dalam jangka panjang, serta bagaimana interaksi antar faktor tersebut memicu proses

pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2016), terdapat empat teori utama yang membahas pertumbuhan ekonomi, antara lain:

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Teori ini berpendapat bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi: jumlah penduduk, stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Para ekonom klasik juga menekankan pengaruh hukum hasil tambahan yang menurun terhadap pertumbuhan ekonomi.

b. Teori Schumpeter

Teori ini menekankan pentingnya peran pengusaha dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Schumpeter, para pengusaha mendorong inovasi dalam kegiatan ekonomi yang memerlukan investasi. Investasi ini dibagi menjadi dua jenis: investasi otonom dan investasi terpengaruh. Kedua jenis investasi inilah yang membantu membangun perekonomian.

c. Teori Harrod-Domar

Teori ini bertujuan menjelaskan syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (*steady growth*) dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan sebagai berikut: (1) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (2) tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (3) rasio modal produksi (*capital output ratio*) tetap nilainya dan (4) perekonomian terdiri dari dua sektor.

d. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori ini berfokus pada faktor-faktor produksi dan berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada perkembangan teknologi serta peningkatan keterampilan tenaga kerja. Menurut Abramovitz dan Solow, kemajuan teknologi, bukan hanya peningkatan modal dan tenaga kerja, merupakan faktor terpenting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

2.1.4 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*), dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut (Nanga, 2005):

$$G = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100 \%$$

Keterangan:

G : Laju pertumbuhan ekonomi ($\Delta Y/Y$)

Y_t : Produk domestik bruto (GDP) pada tahun t

t : Tahun sekarang

Y_{t-1} : Produk domestik bruto (GDP) pada tahun t-1

t-1 : Tahun sebelumnya

Produk Domestik Bruto (GDP) adalah total nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan dalam suatu perekonomian dalam periode tertentu. Sementara itu, produk nasional bruto (GNP) merupakan total nilai pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama waktu yang sama (Nanga, 2005).

Pertumbuhan ekonomi atau GDP mencerminkan perkembangan fisik dalam produksi barang dan jasa di suatu negara, termasuk pertumbuhan jumlah barang industri dan perkembangan infrastruktur. Untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, ukuran yang umum digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2016).

2.1.5 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2012), indikator pertumbuhan ekonomi meliputi beberapa aspek, antara lain:

a. **Pendapatan Nasional Riil**

Perubahan dalam pendapatan nasional riil digunakan oleh berbagai negara untuk mengevaluasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Suatu negara dianggap mengalami pertumbuhan ekonomi jika pendapatan nasional riilnya meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

b. **Pendapatan Per Kapita**

Sebuah negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika ada peningkatan dalam pendapatan masyarakat dari waktu ke waktu.

c. **Kesejahteraan Penduduk**

Meningkatnya kesejahteraan material di masyarakat selama periode yang panjang dapat dilihat dari kelancaran distribusi barang dan jasa dalam negara tersebut.

d. **Tenaga Kerja dan Pengangguran**

Suatu negara dianggap berkembang jika telah mencapai pemanfaatan tenaga kerja yang optimal, yaitu jika tingkat pengangguran berada di bawah empat persen (4%).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur melalui berbagai indikator seperti peningkatan pendapatan nasional riil, pendapatan per kapita, kesejahteraan masyarakat, serta penurunan tingkat pengangguran. Semua indikator tersebut memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemajuan ekonomi dan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

2.1.6 Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi konvensional umumnya diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi suatu negara yang diukur melalui pertambahan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka waktu tertentu. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep pertumbuhan ekonomi memiliki dimensi yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada peningkatan materiil, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai syariah, keadilan, dan kesejahteraan umat.

Menurut Wahyuni dkk. (2023) pertumbuhan ekonomi dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, tetapi juga harus memastikan distribusi kekayaan yang adil, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, pertumbuhan

ekonomi dalam Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Fattah (2024), terdapat beberapa prinsip penting dalam pertumbuhan ekonomi Islam antara lain:

1. Kepatuhan terhadap Syariah

Setiap aktivitas ekonomi yang mendorong pertumbuhan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (spekulasi atau perjudian).

2. Keadilan dan Pemerataan

Pertumbuhan ekonomi harus menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Islam mendorong mekanisme redistribusi kekayaan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam, sesuai dengan konsep *khalifah* (peran manusia sebagai pengelola bumi).

4. Peningkatan Kesejahteraan Spiritual dan Material

Pertumbuhan tidak hanya diukur berdasarkan indikator materi seperti PDB, tetapi juga kesejahteraan spiritual masyarakat, seperti peningkatan akhlak, pendidikan, dan kesehatan.

5. Aktivitas Ekonomi yang Produktif

Islam mendorong aktivitas ekonomi yang berbasis produksi riil, seperti perdagangan, pertanian, dan industri, serta melarang aktivitas ekonomi spekulatif yang tidak menghasilkan nilai tambah nyata.

Sementara itu, menurut Zaini dkk. (2025), keberhasilan pertumbuhan ekonomi dalam Islam diukur dari tercapainya *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan syariat), yakni terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, ukuran pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya berbasis pada angka, tetapi pada sejauh mana kehidupan manusia menjadi lebih bermakna, adil, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam adalah pertumbuhan yang berorientasi pada keadilan sosial, kemakmuran bersama, dan keridhaan Allah SWT, bukan semata-mata akumulasi kekayaan duniawi.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan wajib dari masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dan harus dibayar tanpa imbalan langsung. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam pemerintahan dan pembangunan. Pungutan ini tidak dapat dihindari oleh wajib pajak, dan mereka yang menolak dapat dikenai sanksi. Dengan demikian, pajak menjamin kas negara tetap terisi, serta memastikan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak, sehingga pemerintah

tidak bisa menetapkan pajak secara sewenang-wenang (Mahendra, dkk., 2024).

Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran yang dibayarkan masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Sementara itu, Resmi (2017) mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara akibat keadaan, peristiwa, atau tindakan tertentu yang memberikan hak khusus, namun tidak sebagai hukuman. Pajak ini diatur oleh pemerintah, dapat dipaksakan, dan tidak memberikan balas jasa langsung, melainkan untuk kesejahteraan umum.

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib dari perseorangan atau kelompok kepada negara, yang bersifat memaksa dan didasarkan pada undang-undang. Pajak ini tidak memberikan imbalan langsung, melainkan digunakan untuk kepentingan negara demi kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak adalah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan undang-undang, bersifat memaksa, dan tanpa imbalan langsung. Pajak ini dipungut oleh pemerintah atau instansi yang berwenang dari individu atau badan usaha yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.

Setiap perekonomian memerlukan pemerintah untuk melakukan berbagai pengeluaran. Pembiayaan pengeluaran ini membutuhkan dana yang sebagian besar diperoleh dari pajak yang

dipungut dari rumah tangga dan perusahaan. Pengeluaran pemerintah ini berkontribusi terhadap peningkatan pengeluaran agregat, yang pada gilirannya memperkuat aktivitas ekonomi suatu negara (Sukirno, 2016). Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang vital dalam mendukung pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Besarnya pajak akan menentukan seberapa besar anggaran negara yang dapat dialokasikan untuk pengeluaran, baik itu untuk pembangunan maupun pengeluaran rutin.

Oleh karena itu, agar pendapatan negara dari sektor pajak meningkat, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat memperluas basis pajak, baik dari sisi subjek maupun objek pajak (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Distorsi dalam perekonomian membuat peran pemerintah menjadi krusial dalam menjaga anggaran agar tetap fokus pada sektor-sektor prioritas. Dalam perspektif ekonomi publik, prinsip anggaran bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip anggaran berimbang menjadi sangat penting, karena setiap pengeluaran negara harus didukung oleh penerimaan pajak.

2.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, antara lain:

1. Berdasarkan Golongan

- a. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa dialihkan atau dibebankan kepada pihak lain. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Berdasarkan Sifat

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada kondisi pribadi wajib pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
- b. Pajak objektif adalah pajak yang didasarkan pada objek pajaknya, tanpa memperhitungkan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Berdasarkan Lembaga Pemungut

- a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat untuk mendanai anggaran negara. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Pajak daerah terdiri dari:
 - a) Pajak Provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

- b) Pajak Kabupaten/Kota, seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

2.2.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tidak memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah (Republik Indonesia, 2009).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB (Republik Indonesia, 2009).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan landasan utama pengelompokan pajak kabupaten/kota pada sebagian besar periode penelitian tahun 2015–2024. Undang-undang tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2;
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB;
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah atau PAT;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Pajak MBLB;
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor atau Opsen PKB; dan
9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau Opsen BBNKB (Republik Indonesia, 2022).

Pajak Barang dan Jasa Tertentu merupakan penggabungan beberapa jenis pajak yang sebelumnya dipungut secara terpisah.

Objek PBJT meliputi penjualan atau penyerahan makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan. Ketentuan teknis mengenai pemungutan pajak daerah tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Republik Indonesia, 2023).

Dalam penelitian ini, penerimaan pajak daerah diartikan sebagai keseluruhan realisasi penerimaan yang berasal dari berbagai jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh selama periode 2015–2024. Karena terdapat perubahan regulasi pada periode penelitian, data penerimaan pajak perlu disesuaikan dengan klasifikasi yang digunakan dalam laporan realisasi pendapatan Pemerintah Kota Banda Aceh pada masing-masing tahun.

2.2.3 Fungsi Pajak

Fungsi pajak sebagai sumber pendapatan negara memiliki dua peran utama menurut Resmi (2017):

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*), yaitu sebagai salah satu sumber pendapatan utama pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha mengumpulkan dana sebanyak mungkin ke dalam kas negara.
2. Fungsi pengaturan (*Regulerend*), yaitu sebagai alat untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang sosial dan

ekonomi, serta membantu mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar aspek keuangan.

Sementara itu, Menurut Adiyanta (2020), pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang menggabungkan peran pengaturan (*regulerend*) dan stabilisasi ekonomi. Fungsi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi nasional dalam kondisi kontraksi maupun relaksasi. Pajak juga memiliki fleksibilitas dalam mendukung penerimaan negara yang berkelanjutan. Dengan kombinasi peran ini, pajak tidak hanya membantu pemerintah mengelola pendapatan negara, tetapi juga berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan yang dapat disesuaikan dengan situasi ekonomi yang dinamis.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak, menurut Mardiasmo (2016), dapat dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut:

1) Sistem Penetapan Resmi (*Official Assessment System*)

Ini adalah sistem di mana pemerintah (fiskus) memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya meliputi:

- a. Kewenangan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar ada di tangan fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.

- c. Kewajiban pajak muncul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) Sistem Penilaian Mandiri (*Self Assessment System*)

Dalam sistem ini, Wajib Pajak memiliki wewenang untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah:

- a. Wewenang untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar ada pada Wajib Pajak itu sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak terlibat secara langsung dan tidak banyak melakukan pengawasan.

3) Sistem Pemotongan (*Withholding System*)

Sistem ini memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (yang bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah bahwa wewenang untuk memotong atau memungut pajak terletak pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.5 Dasar Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara negara atau badan umum dengan wajib pajak. Pada awalnya, pajak bukanlah suatu pungutan resmi, melainkan merupakan sumbangan sukarela dari

rakyat kepada raja, yang bertugas melindungi kepentingan negara, menjaga keamanan, dan membiayai pegawai kerajaan. Warga yang tidak menyetor pajak dalam bentuk natura biasanya diwajibkan melakukan pekerjaan terkait kepentingan umum dalam waktu tertentu, sementara mereka yang berstatus sosial tinggi dapat menggantinya dengan membayar sejumlah uang.

Di Indonesia, pajak awalnya berupa upeti yang diberikan rakyat kepada penguasa tanpa ada pengembalian manfaat. Namun, seiring waktu, upeti tersebut mulai digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti menjaga keamanan, membangun infrastruktur, dan menyediakan layanan sosial. Dengan berkembangnya sistem perpajakan, sumbangan yang dulunya bersifat sukarela dan terpaksa diatur dengan lebih baik, memperhatikan prinsip keadilan. Oleh karena itu, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan aturan pemungutan pajak, karena hasil pajak tersebut dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, terdapat setidaknya delapan undang-undang yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Penghasilan.

- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah.
- 6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- 8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

2.2.6 Indikator Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak merupakan seluruh pendapatan negara yang bersumber dari kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak baik individu maupun badan usaha. Pajak berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengukuran terhadap penerimaan pajak menjadi penting untuk menilai efektivitas sistem perpajakan dan kinerja ekonomi. Menurut Mardiasmo (2018), penerimaan pajak dapat diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain:

1. Jumlah Penerimaan Pajak, yaitu total pendapatan negara yang berasal dari pajak dalam periode tertentu. Semakin besar penerimaan pajak, semakin kuat kapasitas fiskal negara dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
2. Rasio Pajak (*Tax Ratio*), yaitu perbandingan antara total penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

dalam suatu tahun. Rasio ini mengukur kontribusi sektor perpajakan terhadap perekonomian secara keseluruhan. Menurut Kementerian Keuangan RI (2021), rasio pajak yang ideal mencerminkan kemampuan negara untuk mengoptimalkan potensi penerimaan dari aktivitas ekonomi.

3. Pertumbuhan Penerimaan Pajak, yaitu kenaikan atau penurunan jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak atau perluasan basis pajak.
4. Komposisi Penerimaan Pajak, yaitu persentase penerimaan dari berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak-pajak lainnya. Komposisi ini memberikan gambaran tentang struktur penerimaan negara dan ketergantungan terhadap jenis pajak tertentu.
5. Tingkat Kepatuhan Pajak, diukur melalui rasio antara jumlah wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajaknya secara benar dan tepat waktu dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, semakin baik penerimaan pajak negara.
6. Efektivitas Penagihan Pajak, diukur dari kemampuan otoritas pajak dalam menagih tunggakan pajak atau penerimaan pajak yang jatuh tempo. Efektivitas penagihan yang tinggi berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

2.2.7 Pajak Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Secara etimologis, istilah pajak dalam bahasa Arab dikenal sebagai *dharibah*, yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribun*, dan *dharibun*, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan (Nursakinah, 2020). Dalam konteks bahasa dan tradisi, *dharibah* memiliki berbagai makna; namun, para ulama umumnya menggunakan istilah *dharibah* untuk merujuk pada harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini terlihat jelas dalam konteks pemungutan *jizyah* dan *kharaj*, yang dikenakan secara *dharibah*, yaitu dengan sifat yang wajib.

Beberapa definisi dan teori pajak dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana dalam Mardiasmo (2011) dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Menurut Abdul Qadim Zallum, pajak adalah kewajiban harta yang Allah SWT tetapkan kepada umat Muslim untuk memenuhi kebutuhan dan pos pengeluaran yang diwajibkan ketika Baitul Mal kekurangan dana.
- b. Abu Yusuf, dalam kitabnya *al-Kharaj*, menekankan bahwa sistem perpajakan yang ideal untuk menghasilkan pendapatan negara secara adil dan menghindari ketidakadilan terhadap pembayar pajak adalah pajak pertanian secara proporsional. Sistem ini mengurangi kezaliman terhadap pembayar pajak dan meningkatkan pendapatan negara. Ia lebih

merekomendasikan sistem *muqasamaah* (pajak proporsional) dibandingkan dengan *mishah* (pajak tetap).

- c. Al-Mawardi menyatakan dalam kitabnya bahwa penilaian terhadap *kharaj* (pajak) harus disesuaikan dengan beberapa faktor, seperti kesuburan tanah, jenis tanaman, sistem irigasi, dan jarak tanah dari pasar. Semua faktor ini menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak.
- d. Ibn Khaldun berpendapat bahwa pajak yang terlalu rendah akan membuat pemerintah kesulitan menjalankan fungsinya, sedangkan pajak yang terlalu tinggi akan menekan para pedagang dan produsen, sehingga mengurangi insentif mereka untuk bekerja. Ia membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori: gaji, laba, dan pajak, masing-masing dengan tingkat optimalnya.

Pajak dalam pandangan ini dianggap sebagai kewajiban sementara yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pemimpin) sebagai tambahan setelah zakat, terutama ketika Baitul Mal kekurangan dana. Pajak ini hanya diwajibkan bagi kaum Muslim yang kaya dan digunakan untuk kepentingan umat, bukan kepentingan umum. Pajak juga dianggap sebagai bentuk jihad untuk melindungi umat Muslim dari bahaya yang lebih besar.

Pada masa Rasulullah SAW, dikenal *jizyah*, yaitu pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim, khususnya Ahli Kitab, sebagai imbalan perlindungan jiwa, properti, kebebasan beribadah, dan pengecualian dari kewajiban militer. Besaran *jizyah* ditetapkan

sebesar satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu. Tujuannya adalah untuk berbagi beban negara dalam menyediakan perlindungan dan keamanan, serta mendorong non-Muslim untuk masuk Islam. *Jizyah* dikenakan kepada laki-laki kafir yang sudah baligh dan berakal, tetapi tidak diwajibkan kepada wanita, anak-anak, atau orang yang tidak mampu secara finansial. Jika seseorang masuk Islam, kewajiban membayar *jizyah* akan dihentikan.

2.2.9 Teori Maqasid Syariah dalam Pengelolaan Pajak

Maqasid syariah merupakan tujuan yang hendak dicapai melalui penerapan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Menurut Al-Ghazali, kemaslahatan berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima unsur tersebut dikenal sebagai *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* (Al-Ghazali, 1997). Selanjutnya, maqasid syariah dikembangkan sebagai pendekatan yang menekankan keadilan, kesejahteraan, pembangunan manusia, dan kemanfaatan kebijakan bagi masyarakat (Auda, 2008).

Dalam pengelolaan pajak, maqasid syariah dapat dijadikan landasan untuk menilai proses pemungutan dan penggunaan penerimaan pajak. Pajak tidak hanya dinilai berdasarkan besarnya penerimaan, tetapi juga harus dipungut secara adil, sesuai dengan kemampuan wajib pajak, serta dikelola secara amanah dan transparan. Pemungutan pajak yang berlebihan atau tidak mempertimbangkan kemampuan masyarakat dapat bertentangan

dengan prinsip perlindungan harta atau *hifz al-mal*. Sebaliknya, pajak yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, fasilitas keagamaan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi dapat mendukung tercapainya lima unsur maqasid syariah.

Dalam penelitian ini, teori maqasid syariah digunakan sebagai landasan untuk menilai penerimaan pajak dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh. Penerimaan pajak seharusnya tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam bentuk peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan, pemerataan pendapatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan pajak yang sesuai dengan maqasid syariah adalah pengelolaan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, amanah, transparansi, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Auda, 2008).

2.3 Penelitian Terkait

Dalam melaksanakan penelitian ini, penelitian terkait dianggap sesuai dengan tema studi ini akan menjadi rujukan bagi penelitian ini. terdapat tiga jurnal nasional yang dijadikan sandaran peneliti dalam mengembangkan kajian guna menemukan jawaban penelitian ini. Beberapa studi yang dimaksud dimanfaatkan peneliti dengan tujuan bahan pendukung penyusunan studi ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dkk. (2024) dengan judul “Analisis Dampak Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Pajak sebagai Variabel

Moderasi di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Penerimaan Pajak sebagai Variabel Moderating di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah Indonesia dan 23 diantaranya dipilih menjadi sampel penelitian ini melalui teknik purposive sampling. Estimasi dilakukan dengan analisis regresi berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Penerimaan Pajak Sebagai Variabel Moderating di Indonesia tahun 2000-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan uji parsial (uji t), Inflasi dan Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia sedangkan uji simultan (Uji F), Inflasi dan Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi. Penerimaan Pajak tidak mampu memoderasi hubungan antara Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho (2020) dengan judul “Analisis Dampak Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan *Vector Autoregressive*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh tingkat penerimaan berbagai pajak dalam negeri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto, rasio pajak penghasilan terhadap total pendapatan pajak, rasio pajak pertambahan nilai terhadap total pendapatan pajak, total penerimaan pemerintah, total tabungan

nasional, dan total pengeluaran nasional. Penelitian ini menggunakan Model Auto Regression Model (VAR). Penelitian ini menggunakan data penerimaan pajak dari tahun 1970 hingga tahun 2010. Penelitian ini menunjukkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak dalam negeri yang memiliki rasio terbesar terhadap total keseluruhan pajak di bandingkan jenis pajak lainnya. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pajak penghasilan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat penerimaan pemerintah memiliki dampak positif terhadap peningkatan rasio pajak penghasilan terhadap total pendapatan pajak Indonesia, rasio pajak pertambahan nilai terhadap total pendapatan pajak Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2018) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode riset yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan unit analisis 34 provinsi di Indonesia pada periode 2013-2016. Data sekunder diolah menggunakan regresi data panel dengan software Stata. Hasil yang diperoleh dari riset ini adalah: penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode 2013-2016. Implikasi dari temuan ini adalah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan

ekonomi suatu daerah, diperlukan dukungan kesinambungan penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah sebaiknya juga dimanfaatkan untuk mendanai proyek yang produktif sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Idham dkk. (2021) berjudul “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate (2010-2019)” bertujuan untuk menganalisis dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengambil sampel dari Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2010 hingga 2019. Untuk menguji data, digunakan Analisis Data Panel dengan bantuan perangkat lunak *Eviews 8*. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi; 2) Retribusi daerah tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi; 3) Secara keseluruhan, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Widyastuti (2022) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak dan juga tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat penerimaan

pajak, tingkat inflasi dan juga tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 dengan total data penelitian tersebut berjumlah 90 data yang berasal dari 30 tahun penelitian dikalikan dengan 3 variabel data perekonomian yaitu diantaranya data rasio penerimaan pajak, tingkat inflasi dan juga PDB. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *judgement sampling* karena sampel yang akan digunakan peneliti mempertimbangkan adanya kelengkapan data yang tersedia yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan menggunakan program computer SPSS versi 25. Penelitian ini memberikan hasil bahwa penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel tingkat inflasi memiliki pengaruh namun kearah negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Lianda dkk. (2021) dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), data yang digunakan adalah data periode 2007-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan

uji statistik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) pada uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yurianto & Akhmad (2021) dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerimaan pajak terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan memanfaatkan data tahunan Provinsi DKI Jakarta dari tahun 1987 hingga 2019. Teknik analisis yang diterapkan berupa regresi linier yang diolah menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut. Selain itu, kebijakan otonomi daerah turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar keberlanjutan penerimaan pajak daerah dijaga guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dana dari penerimaan pajak juga idealnya

dialokasikan pada kegiatan atau proyek yang bersifat produktif agar dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Lesfandra (2021), dengan judul “Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Asing dan Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ekspor, penanaman modal asing, dan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data panel (pooled). Data sekunder tentang Ekspor, Penanaman Modal Asing, Penerimaan Pajak, dan data Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (GDP) dari triwulan I - IV tahun 2017-2019 yang bersumber dari DJPK, BKPM, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan BPS. Teknik analisis data menggunakan Multiple Regression Analysis. Hasil penelitian secara parsial, terdapat pengaruh positif dan signifikan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penanaman modal asing, penerimaan pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Secara simultan, terdapat pengaruh positif dan signifikan ekspor, penanaman modal, dan penerimaan pajak secara terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Zaizafun dkk. (2024), dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.” Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis secara parsial (sendiri) dan secara simultan (bersama) pengaruh variabel penerimaan pajak, dana alokasi umum dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode kuantitatif dengan data sekunder berbentuk data *time series* (deret waktu) yang mana didapat dari Badan Pusat Statistik. Adapun teknik analisa yang dipakai yaitu regresi linier berganda dengan SPSS 26. Hasil penelitian membuktikan bahwasannya secara parsial variabel penerimaan pajak, dana alokasi umum dan pengeluaran pemerintah adanya pengaruh yang signifikan serta positif terhadap pertumbuhan ekonomi dihitung dari laju PDRB di Provinsi Jawa Barat. Secara bersama (simultan) ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat Tahun 2013-2022. Kemudian untuk hasil determinasi (*R-Square*) diperoleh 94,9% yang artinya berpengaruh kuat dan sisanya 5,1% dipengaruhi oleh aspek lain diluar penelitian ini.

Adapun rincian penelitian penelitian terdahulu di atas dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Mahendra dkk. (2024) "Analisis pengaruh	Analisis Regresi Linear Berganda	Inflasi & Nilai Tukar berpengaruh signifikan	Variabel dependen yaitu	Variabel independen yaitu

	inflasi dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak sebagai variabel moderating di Indonesia.”	dengan SPSS	terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerimaan Pajak tidak mampu memoderasi hubungan tersebut.	pertumbuhan ekonomi	penerimaan pajak
2	Sihaloho (2020) “Analisis Dampak Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Pendekatan <i>Vector Autoregressive</i> .”	Model <i>Auto Regression Model</i> (VAR) dengan <i>software</i> Eviews 6	Pajak penghasilan & PPN berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi	Variabel independen yaitu penerimaan pajak
3	Saragih (2018) “Pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.”	Analisis Regresi Data Panel dengan <i>software</i> STATA	Penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi.	Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi	Variabel independen yaitu penerimaan pajak
4	Idham dkk. (2021) “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan	Analisis Regresi Data Panel dengan <i>software</i> Eviews 8	Pajak daerah berpengaruh positif signifikan; retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan	Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi	Metode analisis menggunakan regresi data panel dengan <i>software</i> Eviews 8

	Ekonomi di Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate (2010-2019).”		terhadap pertumbuhan ekonomi.		
5	Pratama & Widyastuti (2022) “Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.”	Analisis Regresi Linear Berganda dengan SPSS Versi 25	Pajak tidak berpengaruh; inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.	Variabel Independen yaitu penerimaan pajak dan Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.	Metode analisis menggunakan regresi data panel dengan <i>software</i> Eviews 8
6	Lianda dkk. (2021) “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh.”	Analisis Regresi Linear Berganda dengan SPSS	Pajak daerah & retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi	Metode analisis menggunakan regresi data panel dengan <i>software</i> Eviews 8
7	Yurianto & Akhmad (2021) “Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta.”	Analisis Regresi Linear Berganda dengan SPSS - R	Pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Variabel Independen yaitu penerimaan pajak dan Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.	Metode analisis menggunakan regresi data panel dengan <i>software</i> Eviews 8
8	Lesfandra (2021) “Pengaruh Ekspor, Penanaman Modal Asing dan Penerimaan	<i>Multiple Regression Analysis</i>	Ekspor berpengaruh signifikan; PMA dan pajak tidak berpengaruh secara	Variabel Independen yaitu penerimaan pajak dan Variabel dependen yaitu	Menggunakan data triwulan tahun 2017–2019 Indonesia

	Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.”		parsial, tapi secara simultan ketiganya berpengaruh signifikan.	pertumbuhan ekonomi.	
9	Zaizafun dkk. (2024) “Pengaruh Penerimaan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.”	Analisis Regresi Linear Berganda dengan SPSS	Pajak, DAU, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Variabel Independen yaitu penerimaan pajak dan Variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi.	Menggunakan data tahun Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2022.

Sumber: Data diolah (2025)

2.4 Kerangka Berpikir

2.4.1 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.4.1.1 Pengaruh Variabel Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara maupun daerah yang berfungsi untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks ekonomi makro, peningkatan penerimaan pajak dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah, sehingga pemerintah dapat membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor produktif lainnya. Investasi pemerintah ini, pada akhirnya, akan mendorong

peningkatan output nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mankiw, 2018).

Namun demikian, hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi tidak selalu bersifat linier. Jika pajak terlalu tinggi, dapat menekan aktivitas ekonomi karena menurunkan insentif berproduksi bagi dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penerimaan pajak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada struktur pajak yang efektif dan alokasi belanja pemerintah yang produktif (Rambe dan Febriani, 2020). Di Kota Banda Aceh, sebagai daerah yang menerapkan sistem ekonomi berbasis syariah, optimalisasi penerimaan pajak harus diselaraskan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan umat sebagaimana dianjurkan dalam ekonomi Islam.

Penelitian terdahulu yang mendukung hubungan ini dilakukan oleh Sihalo (2020) menemukan bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Saragih (2018) juga menemukan bahwa penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia selama periode 2013-2016. Selain itu, dalam penelitian Pratama & Widyastuti (2022) menemukan bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

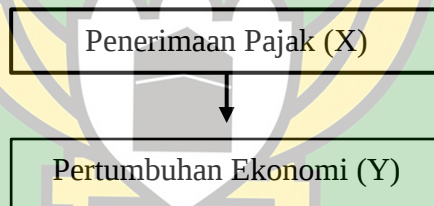
Berdasarkan teori dan temuan-temuan empiris di atas, maka dalam penelitian ini diasumsikan bahwa penerimaan pajak di Kota Banda Aceh berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

daerah. Hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat Banda Aceh memiliki karakteristik khusus dalam pengelolaan keuangannya yang berbasis pada nilai-nilai syariat Islam.

2.4.2 Model Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka berpikir adalah konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Berdasarkan penjelasan pengaruh antar variabel pada penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat seperti pada Gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir Penelitian



Dalam penelitian ini, kerangka berpikir disusun untuk menjelaskan hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh menurut perspektif ekonomi Islam. Penerimaan pajak (X) merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal yang berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik. Peningkatan penerimaan pajak akan memperbesar kapasitas fiskal pemerintah, yang pada gilirannya mampu

mendorong peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi (Y). Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, penerimaan pajak hanya dibenarkan apabila penggunaannya diarahkan untuk kemakmuran rakyat dan tidak menimbulkan beban berlebihan bagi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas penerimaan pajak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada sejauh mana pengelolaannya mencerminkan nilai-nilai Islam tersebut.

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara dalam sebuah penelitian, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_a : Penerimaan Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh periode tahun 2015-2024.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (*quantitative research*) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh periode tahun 2015-2024. Menurut Sudaryana dan Agusiady (2022) variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini memiliki dua variabel penelitian, yaitu: (1) variabel independen, dan (2) variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, sedangkan variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel independen (Dewi & Budhi, 2018).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh dengan objek kajian berupa data penerimaan pajak dan laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2015-2024. Data penelitian ini diperoleh dari publikasi resmi yang diterbitkan langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber eksternal. Dalam konteks penelitian ini, data dikumpulkan melalui publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, yang mencakup:

1. Data Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 dalam satuan persentase, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.
2. Data Penerimaan Pajak di Kota Banda Aceh periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 dalam satuan juta rupiah, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, seperti laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Direktorat Jenderal Pajak, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Data yang digunakan mencakup periode tahun 2015 hingga 2024, yang diambil dari publikasi dan arsip lembaga terkait.

Penggunaan metode dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, valid, dan relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menganalisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri tren dan perkembangan ekonomi Kota Banda Aceh dalam kurun waktu lima tahun terakhir secara sistematis dan terukur.

3.5 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data terkait penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh dalam periode 2015 hingga 2024. Karena penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat *time series* (deret waktu), maka teknik sampling tidak diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan seluruh data penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh selama perioden tahun 2015 s/d 2024 dianalisis secara menyeluruh.

3.6 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat dua variabel yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independen).

a. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel terikat atau variabel dependen (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi.

b. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas atau variabel independen (X) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2019). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan hasil identifikasi variabel di atas, selanjutnya dapat diuraikan definisi operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Defenisi Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Satuan Data
1	Penerimaan Pajak	Realisasi penerimaan pajak periode 2015–2024 di Kota Aceh.	Milyar Rupiah /Tahun
2	Pertumbuhan Ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi periode 2015-2024 di Kota Aceh.	Persentase /Tahun

Sumber: Data diolah (2025)

3.8 Uji Asumsi Klasik

3.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Normalitas data merupakan salah satu syarat dalam analisis regresi linier klasik agar hasil analisis dapat diinterpretasikan secara valid. Menurut Sudjana (2005), uji normalitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya

perbedaan proporsi pada subjek, objek, maupun kejadian yang diteliti dalam konteks distribusi data terhadap kurva normal.

Lebih lanjut, Suliyanto (2011) menjelaskan bahwa uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Residual dikatakan berdistribusi normal apabila nilai-nilainya mendekati rata-rata dan tersebar secara simetris. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Jika nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05, maka data dikatakan berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal.

3.8.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual antar pengamatan. Jika varian residual berbeda antara satu pengamatan dengan lainnya, maka kondisi tersebut disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami heteroskedastisitas, artinya varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas) (Ghozali, 2016).

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan melihat pola pada grafik *scatterplot*. Model regresi dikatakan tidak mengalami heteroskedastisitas jika grafik *scatterplot* menunjukkan:

1. Titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
2. Titik-titik data tidak berkumpul hanya di satu sisi (baik di atas maupun di bawah sumbu 0).
3. Penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola tertentu, seperti gelombang yang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Tidak terdapat pola sistematis dalam penyebaran titik-titik data.

Dengan demikian, jika tidak ditemukan pola tertentu dalam grafik scatterplot dan titik-titik menyebar secara acak, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.9 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana. Menurut Sugiyono (2013), regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen, yang memiliki hubungan kausal atau sebab-akibat. Adapun model persamaan regresi linear sederhana yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX + e$$

Dengan ketentuan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi (Variabel Dependen)

X = Penerimaan Pajak (Variabel Independen)

a = Konstanta (intersep), yaitu nilai Y ketika $X = 0$

e = error term atau residual

b = Koefisien regresi, menunjukkan besar perubahan Y untuk setiap satuan perubahan X

Jika nilai b positif, maka menunjukkan adanya hubungan positif antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika nilai b negatif, maka menunjukkan adanya hubungan negatif antara keduanya.

3.10 Pengujian Hipotesis

3.10.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali dalam Sujarweni (2015), uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi (probabilitas). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Adapun kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- c. Jika nilai t hitung $> t$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

- d. Jika nilai t hitung $< t$ tabel, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

3.10.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

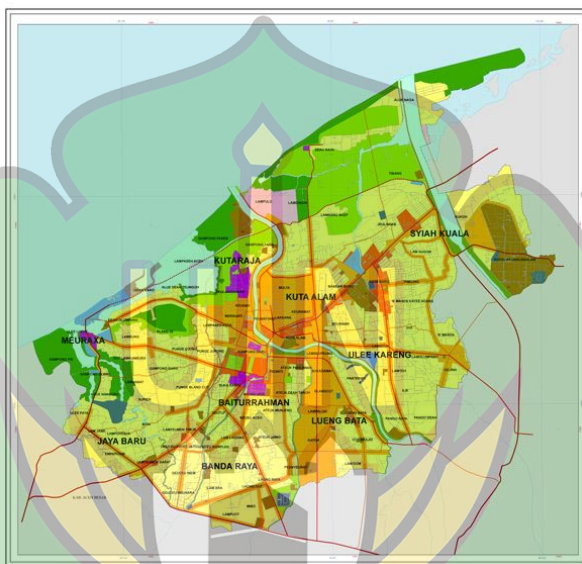
Menurut Ghozali dalam Sujarweni (2015), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R^2 menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan perubahan pada variabel terikat; semakin tinggi nilai R^2 , semakin besar bagian variasi variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel bebas. Dengan kata lain, R^2 menggambarkan kekuatan hubungan secara keseluruhan antara variabel bebas dan terikat dalam kerangka model regresi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Peta Kota Banda Aceh



Sumber: Bappeda Kota Banda Aceh (2025)

Gambar 4.1
Peta Kota Banda Aceh

Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Kota ini memiliki posisi strategis sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya di wilayah Aceh. Secara geografis, Kota Banda Aceh berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar dan Samudera Hindia, yang menjadikannya memiliki akses yang luas terhadap aktivitas darat maupun laut. Wilayah administratif Kota Banda Aceh terbagi menjadi beberapa kecamatan yang

masing-masing memiliki potensi ekonomi dan sosial tersendiri. Peta Kota Banda Aceh pada Gambar 4.1 memberikan gambaran visual mengenai batas wilayah, pembagian kecamatan, serta posisi strategis kota ini dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

4.1.2 Jumlah Penduduk Kota Banda Aceh

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh tahun 2025, jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2024 tercatat sebanyak 265.310 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di sembilan kecamatan yang ada di wilayah administrasi kota ini. Rincian jumlah penduduk per kecamatan disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Meuraxa	29.183
2	Jaya Baru	27.784
3	Banda Raya	30.774
4	Baiturrahman	48.121
5	Lueng Bata	26.474
6	Kuta Alam	26.270
7	Kuta Raja	15.820
8	Syiah Kuala	26.985
9	Ulee Kareng	39.589
Jumlah Total		265.310

Sumber: BPS Kota Banda Aceh (2025)

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2025 tersebar secara tidak merata di sembilan kecamatan. Kecamatan Baiturrahman menempati urutan tertinggi dengan jumlah penduduk sebanyak 48.121 jiwa, menjadikannya sebagai kawasan dengan kepadatan penduduk yang paling besar. Sebaliknya, Kecamatan Kuta Raja memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 15.820 jiwa. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan tingkat perkembangan wilayah, ketersediaan infrastruktur, dan aktivitas ekonomi di masing masing kecamatan. Informasi ini penting sebagai dasar analisis dalam memahami distribusi penduduk dan potensi wilayah dalam konteks sosial ekonomi yang menjadi fokus penelitian.

4.2 Gambaran Umum Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder mengenai penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh periode 2015–2024. Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia. Data awal yang tersedia dalam bentuk data tahunan, kemudian diolah menjadi data triwulanan (quartile) menggunakan teknik interpolasi data.

Penggunaan teknik interpolasi dilakukan untuk menghasilkan jumlah observasi yang lebih memadai dalam analisis statistik, khususnya pada pengujian regresi *time series*. Selain itu, konversi

data tahunan menjadi data triwulanan bertujuan untuk meminimalkan potensi bias estimasi yang dapat muncul akibat keterbatasan jumlah data observasi apabila hanya menggunakan data tahunan. Dengan demikian, data penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai dinamika penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh selama periode pengamatan.

Tabel 4.2
Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh 2015-2024

Tahun	Quartil	Pajak	Pertumbuhan Ekonomi
2015	Q1	48.95	3.89
2015	Q2	53.94	4.78
2015	Q3	58.31	5.44
2015	Q4	62.06	5.89
2016	Q1	65.19	6.12
2016	Q2	67.70	6.14
2016	Q3	69.59	5.94
2016	Q4	70.86	5.52
2017	Q1	69.71	3.78
2017	Q2	70.46	3.37
2017	Q3	71.30	3.19
2017	Q4	72.24	3.23
2018	Q1	72.58	4.27
2018	Q2	73.99	4.45
2018	Q3	75.78	4.54
2018	Q4	77.94	4.55
2019	Q1	84.63	5.38
2019	Q2	85.89	4.84
2019	Q3	85.87	3.86
2019	Q4	84.57	2.43
2020	Q1	77.13	-3.13

2020	Q2	75.20	-3.99
2020	Q3	73.93	-3.82
2020	Q4	73.31	-2.62
2021	Q1	73.39	3.60
2021	Q2	74.07	5.25
2021	Q3	75.40	6.32
2021	Q4	77.38	6.83
2022	Q1	81.53	5.32
2022	Q2	84.17	5.25
2022	Q3	86.85	5.20
2022	Q4	89.57	5.15
2023	Q1	90.74	4.94
2023	Q2	94.14	4.97
2023	Q3	98.20	5.08
2023	Q4	102.92	5.26
2024	Q1	108.29	5.51
2024	Q2	114.33	5.84
2024	Q3	121.02	6.24
2024	Q4	128.37	6.72

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.2, terlihat bahwa penerimaan pajak Kota Banda Aceh menunjukkan kecenderungan meningkat sepanjang periode penelitian, meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa periode tertentu. Pada tahun 2015, penerimaan pajak berada pada kisaran 48,94 milyar, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 128,36 milyar pada kuartal IV tahun 2024. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perkembangan kapasitas fiskal daerah dan meningkatnya aktivitas ekonomi yang berkontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh juga memperlihatkan pola yang berfluktuasi. Sebelum tahun 2020, pertumbuhan ekonomi cenderung berada pada kategori positif dengan kisaran antara 3%–6%. Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi yang ditunjukkan oleh nilai pertumbuhan negatif pada seluruh kuartal, dengan titik terendah sebesar –3,988% pada kuartal II. Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi secara nasional maupun regional.

Memasuki periode 2021–2024, pertumbuhan ekonomi kembali menunjukkan tren pemulihan dengan nilai pertumbuhan yang kembali positif dan relatif stabil. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 6,722% pada kuartal IV, yang menunjukkan adanya penguatan aktivitas ekonomi daerah pasca periode kontraksi.

4.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal. Terdapat dua metode yang umum digunakan untuk mendeteksi normalitas residual, yaitu analisis grafik dan analisis statistik. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov smirnov, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka

nilai residual berdistribusi normal dan jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

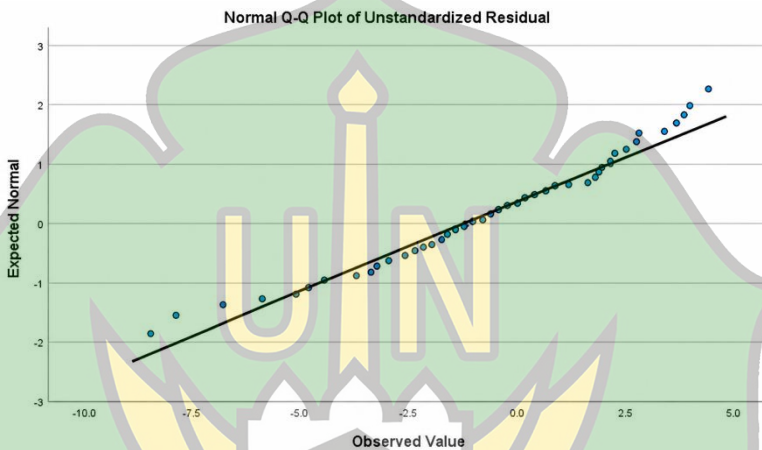
Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.38296404
Most Extreme Differences	Absolute	.194
	Positive	.145
	Negative	-.194
Test Statistic		.194
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2026)

Berdasarkan hasil uji di atas, diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi salah satu asumsi klasik, yaitu normalitas residual.

Selain menggunakan uji statistik, normalitas data juga dapat dilihat melalui grafik Normal P-P Plot. Jika titik-titik pada grafik tersebut menyebar dan mengikuti arah garis diagonal, maka data dapat dikatakan berdistribusi normal.



Gambar 4.2
Grafik P-Plot Uji Normalitas Data

Dari Gambar 4.2 terlihat bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan menunjukkan pola yang mendekati garis tersebut. Hal ini mendukung hasil uji Kolmogorov-Smirnov bahwa data residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami heteroskedastisitas, yaitu ketika

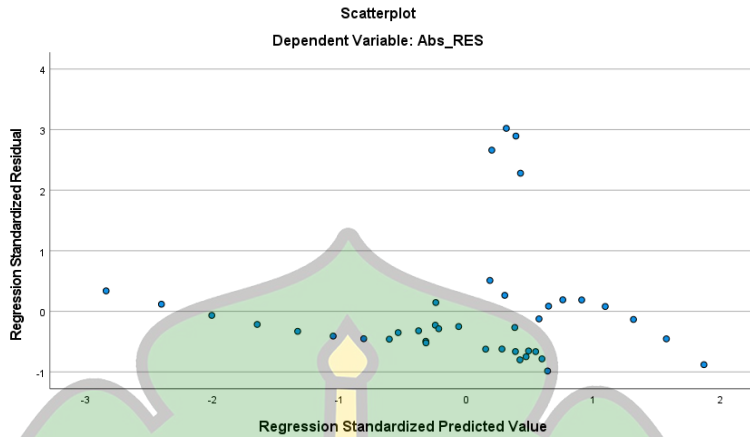
varians residual bersifat konstan (homoskedastisitas). Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan menggunakan uji Glejser dan diperkuat dengan analisis scatterplot.

Tabel 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a								
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.172	1.574		2.650	.012		
	Pajak	-.031	.019	-.254	-1.618	.114	1.000	1.000
a. Dependent Variable: Abs_RES								

Berdasarkan Tabel 4.4, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,114. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,114 > 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual dari model regresi bersifat konstan sehingga salah satu asumsi klasik regresi telah terpenuhi.

Selain menggunakan uji statistik, pengujian heteroskedastisitas juga dilakukan melalui analisis grafik scatterplot sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar scatterplot di atas, terlihat bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di sekitar garis horizontal (nilai 0 pada sumbu Y), baik di atas maupun di bawahnya. Penyebaran titik tidak menunjukkan pola tertentu seperti pola mengerucut (*funnel*), melebar, atau membentuk gelombang. Meskipun terdapat beberapa titik yang berkumpul pada area tertentu, secara keseluruhan pola penyebaran data masih bersifat acak.

Oleh karena itu, hasil analisis scatterplot memperkuat hasil uji Glejser, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas atau telah memenuhi asumsi homoskedastisitas. Dengan demikian, model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4.3.3 Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Analisis dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh melalui kuesioner dan diolah menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS. Hasil pengolahan data melalui uji regresi linear sederhana disajikan pada Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.5
Hasil Uji Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.264	2.111		.599	.553
Pajak	.036	.026	.220	1.391	.172

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, diperoleh nilai konstanta (a) sebesar 1,264 dan nilai koefisien regresi untuk variabel penerimaan pajak (b) sebesar 0,036. Dengan demikian, persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

$$Y = 1,264 + 0,036X$$

Hasil persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel penerimaan pajak akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,036 satuan. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan adanya hubungan positif atau searah antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan penerimaan pajak cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh.

Nilai konstanta sebesar 1,264 menunjukkan bahwa apabila variabel penerimaan pajak dianggap bernilai nol ($X = 0$), maka nilai pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 1,264. Akan tetapi, nilai konstanta tersebut merupakan nilai teoritis dalam model regresi dan tidak selalu menggambarkan kondisi aktual yang terjadi di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, penerimaan pajak memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh. Selanjutnya, untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh tersebut, diperlukan analisis melalui uji t (uji parsial).

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05.

Suatu variabel dikatakan berpengaruh secara signifikan apabila nilai signifikansi (Sig.) lebih kecil dari 0,05. Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika nilai $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Nilai t tabel diperoleh berdasarkan $\alpha = 5\%$ (0,05) dengan derajat kebebasan (df) = $n - k$, yaitu jumlah sampel dikurangi jumlah variabel independen. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh nilai t tabel sebesar 2,024. Adapun hasil dari uji t secara parsial terhadap variabel penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6
Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		ABR -	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.264	2.111		.599
	Pajak	.036	.026	.220	.172

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, diperoleh bahwa nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,172 > 0,05 dan nilai t hitung sebesar

$1,391 < t$ tabel sebesar 2,024. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti pengaruh variabel Penerimaan Pajak tidak signifikan secara statistik terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Banda Aceh tahun 2015-2024.

4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak (X) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), dilakukan perhitungan statistik dengan menggunakan koefisien determinasi.

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.220 ^a	.048	.023	2.70329

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, diketahui bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,048 atau 4,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak (X) mampu menjelaskan variasi terhadap variabel pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 4,8%, sedangkan sisanya sebesar 95,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Dengan demikian, meskipun terdapat hubungan antara penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi, namun kontribusi penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah.

4.5 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear sederhana yang telah dilakukan, diperoleh bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t parsial yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,172 ($> 0,05$) dan nilai t hitung sebesar 1,391 yang lebih kecil dibandingkan t tabel sebesar 2,024. Dengan demikian, H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh.

Meskipun demikian, koefisien regresi bernilai positif sebesar 0,036 menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hubungan tersebut belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,048 atau 4,8%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah hanya mampu menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8%, sedangkan sisanya sebesar 95,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti investasi daerah, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, inflasi, tingkat pengangguran, serta kondisi ekonomi nasional dan global.

Rendahnya pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, penerimaan pajak daerah Kota Banda

Aceh kemungkinan belum memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi daerah. Kedua, pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti investasi, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah daerah, dan perkembangan sektor jasa maupun perdagangan. Ketiga, data penelitian pada awalnya berbentuk data tahunan, kemudian diolah menjadi data triwulanan menggunakan teknik interpolasi data untuk menambah jumlah observasi penelitian. Penggunaan interpolasi memungkinkan data menjadi lebih rinci untuk kebutuhan analisis statistik, namun pola data hasil interpolasi tetap berasal dari tren tahunan sehingga variasi data tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil setiap triwulan. Kondisi ini dapat memengaruhi kekuatan hubungan statistik antara variabel penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratama dan Widyastuti (2022) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerimaan pajak belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal karena dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan fiskal dan kondisi ekonomi makro. Temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Lesfandra (2021) yang menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak tidak selalu diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Saragih (2018) yang menemukan bahwa penerimaan pajak provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan cakupan wilayah, jenis data, dan karakteristik objek penelitian. Penelitian Saragih menggunakan data panel dari 34 provinsi di Indonesia sehingga cakupan data lebih luas dan variasi ekonominya lebih besar dibandingkan penelitian ini yang hanya berfokus pada Kota Banda Aceh. Selain itu, penerimaan pajak daerah di tingkat kota memiliki kapasitas fiskal yang relatif lebih kecil dibandingkan tingkat provinsi sehingga pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga cenderung lebih terbatas.

Hasil penelitian ini juga tidak sepenuhnya sejalan dengan penelitian Alpad (2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Perbedaan tersebut kemungkinan terjadi karena penelitian Alpad menggunakan pendekatan kualitatif studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linear sederhana. Selain itu, objek penelitian pada tingkat provinsi memiliki cakupan penerimaan pajak dan aktivitas ekonomi yang lebih luas dibandingkan Kota Banda Aceh.

Di sisi lain, penelitian Drieandita dan Santoso (2023) menunjukkan bahwa pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu mempercepat

pemerataan ekonomi antardaerah di Indonesia. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa secara teoritis pajak memiliki fungsi alokasi dan distribusi yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, pada konteks Kota Banda Aceh, pengaruh tersebut belum terlihat signifikan karena kemungkinan pengelolaan dan alokasi pajak daerah belum sepenuhnya mampu mendorong produktivitas ekonomi secara optimal.

Selain itu, Syahputra dkk. (2024) menjelaskan bahwa perpajakan merupakan instrumen fiskal utama yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat distribusi kesejahteraan masyarakat. Pajak seharusnya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi apabila dikelola secara efektif dan diarahkan pada sektor-sektor produktif. Oleh karena itu, meskipun hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan, penerimaan pajak daerah tetap memiliki peran penting sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, pajak (*al-dharibah*) merupakan instrumen keuangan negara yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pajak harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemanfaatan (*al-maslahah*), dan amanah. Sebagaimana dijelaskan oleh Daryanti dkk. (2024), penerimaan negara, termasuk pajak, seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, dan penyediaan fasilitas publik. Al-Ghazali dalam kitab *al-*

Mustashfa min 'Ilm al-Usul juga menegaskan bahwa kemaslahatan umat merupakan tujuan utama dalam setiap kebijakan negara. Dengan demikian, apabila penerimaan pajak belum mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, maka hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa pengelolaan dan distribusi pajak daerah belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Banda Aceh periode 2015–2024 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,172 lebih besar dari 0,05 serta nilai t hitung sebesar 1,391 lebih kecil dari t tabel sebesar 2,024. Dengan demikian, variabel penerimaan pajak daerah tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh.

Meskipun demikian, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki hubungan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 0,036. Artinya, peningkatan penerimaan pajak daerah cenderung diikuti oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun pengaruh tersebut belum cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik. Selain itu, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,048 menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah hanya mampu menjelaskan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8%, sedangkan sisanya sebesar 95,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian, seperti investasi, belanja pemerintah, konsumsi masyarakat, inflasi, dan faktor ekonomi lainnya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, diharapkan untuk terus meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, serta mengalokasikan penerimaan pajak secara optimal pada sektor-sektor produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti UMKM, pendidikan, dan infrastruktur. Hal ini selaras dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong pemanfaatan dana publik untuk kemaslahatan bersama.
2. Bagi masyarakat, diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab sosial demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam pandangan ekonomi Islam, kontribusi terhadap negara melalui pajak diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, tidak membebani, dan digunakan untuk kemaslahatan umat.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam meningkatkan administrasi, digitalisasi layanan, dan edukasi perpajakan. Kebijakan pajak juga perlu disesuaikan dengan potensi ekonomi daerah serta dilaksanakan secara transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel lain yang juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti investasi daerah, belanja pemerintah, dan tingkat konsumsi masyarakat, agar analisis yang dihasilkan lebih komprehensif dan mencerminkan kondisi ekonomi secara lebih utuh.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanta, F. S. (2020). Fleksibilitas pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengantisipasi krisis ekonomi sebagai akibat dampak pandemi covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 162-181.
- Al-Ghazali, A. H. M. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah.
- Alpad, A. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 651-655.
- Alwiyah, A. (2014). Pengaruh Belanja Pemerintah Dan Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumenep. *Performance: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 4(1).
- Amalia, F., Sinaga, R., Soeyatno, R. F., Silitonga, D., Solikin, A., Hubbansyah, A. K., ... & Ladjin, N. (2022). *Ekonomi pembangunan*. Bandung: Penerbit Widina.
- Asih, S., & Irawan. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap Belanja Daerah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Kabupaten Dan Kota. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1).
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Ayuningtyas, V. P., Puspita, N. A., & Prakoso, B. (2023). Peran hukum investasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam perspektif Neo-Classical Economy Theory. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 88-102.

- Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Aceh Tahun 2022 dan 2021*. Banda Aceh: Pemerintah Aceh.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh. (2021). *Kota Banda Aceh dalam Angka 2021*. Banda Aceh: BPS Kota Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik. (2007-2020). Realisasi pendapatan negara (dalam milyar rupiah). <https://www.bps.go.id/statistictable/2009/02/24/1286/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-2007-2020.html> (diakses tanggal 2 April 2026).
- Badan Pusat Statistik. (2015-2024). Realisasi pendapatan negara (dalam milyar rupiah). <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara-milyar-rupiah-.html> (diakses tanggal 2 April 2026).
- Boediono. (2016). *Teori pertumbuhan ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Daryanti, D., Asriyana, A., & Hasti, A. (2024). Etika dan keadilan pajak dalam perspektif Islam. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 21(1), 61-70.
- Dewi, J. K., & Sri Budhi, M. K. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Universitas Udayana. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Drieandita, K., & Santoso, D. B. (2023). Analisis Dampak Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 269-276.
- Fattah, A. (2024). Implementasi maqashid syariah dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia: Analisis pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi berkelanjutan. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 194-208.

- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 20*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haafiz, F. A. (2024). *Pengaruh pembiayaan LKMS, zakat dan dana bantuan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2015–2022* (Skripsi, FEB UIN Jakarta).
- Halim, N. L., Kumenaung, A. G., & Engka, D. S. M. (2019). Analisis Pendapatan Pajak Dan Retribusi Terhadap Belanja Modal Dam Dampaknya Pada Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado 2007-2015. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(2).
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi makro*. Depok: Kencana.
- Hidayat, A. dan Nalle, F. W. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah, Tenaga Kerja dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.15, No.01. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas WisnuWardhana Malang dan Universitas Timor.
- Idham, N., Walewangko, E. N., & Siwu, H. F. D. (2021). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Tidore kepulauan dan kota Ternate (2010-2019). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Buku statistik APBN 2021*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Latuconsina, Z. M. Y. (2017). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Malang Berbasis Pendekatan Perwilayahan dan Regresi Data Panel. *Journal of Regional and Rural Development Planning*.
- Lesfandra, L. (2021). Pengaruh ekspor, penanaman modal asing, dan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi

- Indonesia. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 7(2), 180–188.
- Liana, W., Kusumastuti, S. Y., Damanik, D., Hulu, D., Apriyanto, A., Judijanto, L., ... & Milia, J. (2024). *Teori Pertumbuhan Ekonomi: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lianda, P. Y., Priantana, R. D., & Aswadi, K. (2021). Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra*, 2(3), 153–159.
- Mahendra, A., Pramita, E. H., Jannah, S. R., Zahara, D., & Gulo, S. R. (2024). Analisis pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi dengan penerimaan pajak sebagai variabel moderating di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 336–347.
- Mankiw, G. N. (2018). *Pengantar ekonomi makro* (Edisi Ketujuh). Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2011). Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi Tahun 2018). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (JMAS)*, 2(3).
- Mukarramah, H. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 2014. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi

Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Nanga, M. (2005). *Makro ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nisa, C. F., Taher, A. R. Y., Ananta, P., & Suparta, I. W. (2025). Analisis Ketimpangan Pembangunan Daerah Di 34 Provinsi Indonesia. *E-journal Field of Economics, Business and Entrepreneurship (EFEBE)*, 3(2), 454-466.
- Norista, G. P., & Mudakir, Y. B. (2011). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Operasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah (2005 - 2008). *E-Journal Undip*, 1(1).
- Nursakinah, N. (2020). Pengaruh penerimaan pajak dan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2007-2016 (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan).
- Pemerintah Kota Banda Aceh. (2024). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2023*. Banda Aceh: Pemerintah Kota Banda Aceh.
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh penerimaan pajak dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1).
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1).
- Putra, I. M. (2017). *Perpajakan: Tax Amnesty*. Anak Hebat Indonesia.
- Rambe, R. A., & Febriani, R. E. (2020). Peran belanja pemerintah dan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan

kota di Sumatera. *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 3(1), 57–76.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4.

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Romdani, M. F., Rahmadi, S., & Aminah, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Komponen Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 6(1).

Saragih, A. H. (2018). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sikap*, 3(1), 277683.

Saragih, A. H. (2018). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sikap*, 3(1), 17-27.

Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia: pendekatan vektor autoregressive. In *Forum Ekonomi* (Vol. 22, No. 2, pp. 202-209).

- Simanjuntak, T., & Mukhlis, I. (2012). *Dimensi ekonomi perpajakan dalam pembangunan ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup).
- Sudaryana, B., & Agusiady, H. R. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Deepublish Publisher.
- Sudjana. (2005). *Metode statistik* (Cet. 1). Bandung: PT Tarsito.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2015). *Metode penelitian bisnis dan ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Sukirno, S. (2012). *Makro ekonomi modern*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika terapan: Teori dan aplikasi dengan SPSS* (Edisi 1). Yogyakarta: ANDI.
- Suriyanti, S., Asriany, A., Syamsuddin, S., & Bustami, T. (2024). Dampak inflasi terhadap perilaku konsumen dan kebijakan ekonomi di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 786-794.
- Syahputra, D. H., Putra, M. R., & Anantha, A. (2024). Peran Perpajakan dalam Perekonomian Indonesia: Tinjauan Sistem Perpajakan di Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(3), 335-348.
- Syarif, A. (2021). *Ekonomi Islam: Suatu pendekatan kontemporer*. Bening Media Publishing.
- Utamia, P., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Bumda, Dan Belanja Modal

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Maibie*, 1(1).
- Wahyuni, S., Majid, M. S. A., & Ridwan, M. (2023). Mekanisme distribusi kekayaan negara dalam ekonomi Islam. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2652–2666.
- Wardani, W., Zulaili., Suriana., Abdullah, U., & Subaktiar. (2024). *Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akselerasi Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*. Bandung: Widina Media Utama.
- Widarjono, A. (2017) *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yurianto, Y., & Akhmad, T. (2021). Pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(4), 436–449.
- Yusuf, Y., Anthoni, L., Budi, S., Puspitasari, N. L., & Zendrato, J. E. D. (2023). Mengenalkan pajak sejak dini: Upaya edukasi pajak pada remaja di Yayasan Al-Ikhwaniyah, Limo Depok. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 2(3), 16-21.
- Zaini, M., Azzahroh, E. P., & Widiaty, E. (2025). Analisis kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir dalam perspektif maqashid syariah: Studi kasus Pantai Gading, Mataram. *Peradaban Journal of Economic and Business*, 4(1), 55–70.
- Zaizafun, A. F., Wartoyo, W., & Djuwita, D. (2024). Pengaruh penerimaan pajak, dana alokasi umum dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2013–2022. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, 2(1), 56–65.



LAMPIRAN-LAPIRAN

Lampiran 1. Data Primer Penelitian

Data Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh Tahun 2015 - 2024

Kota Banda Aceh			
No	Tahun	Penerimaan Pajak	Pertumbuhan Ekonomi
1	2015	55,81	5,00
2	2016	68,33	5,93
3	2017	70,93	3,39
4	2018	75,07	4,45
5	2019	85,24	4,13
6	2020	74,89	-3,39
7	2021	75,06	5,50
8	2022	85,53	5,23
9	2023	96,50	5,06
10	2024	118,00	6,08

Hasil Interpolasi Data

Tahun	Quartil	Pajak	Pertumbuhan Ekonomi
2015	Q1	48.95	3.89
2015	Q2	53.94	4.78
2015	Q3	58.31	5.44
2015	Q4	62.06	5.89
2016	Q1	65.19	6.12
2016	Q2	67.70	6.14
2016	Q3	69.59	5.94
2016	Q4	70.86	5.52
2017	Q1	69.71	3.78
2017	Q2	70.46	3.37
2017	Q3	71.30	3.19
2017	Q4	72.24	3.23

2018	Q1	72.58	4.27
2018	Q2	73.99	4.45
2018	Q3	75.78	4.54
2018	Q4	77.94	4.55
2019	Q1	84.63	5.38
2019	Q2	85.89	4.84
2019	Q3	85.87	3.86
2019	Q4	84.57	2.43
2020	Q1	77.13	-3.13
2020	Q2	75.20	-3.99
2020	Q3	73.93	-3.82
2020	Q4	73.31	-2.62
2021	Q1	73.39	3.60
2021	Q2	74.07	5.25
2021	Q3	75.40	6.32
2021	Q4	77.38	6.83
2022	Q1	81.53	5.32
2022	Q2	84.17	5.25
2022	Q3	86.85	5.20
2022	Q4	89.57	5.15
2023	Q1	90.74	4.94
2023	Q2	94.14	4.97
2023	Q3	98.20	5.08
2023	Q4	102.92	5.26
2024	Q1	108.29	5.51
2024	Q2	114.33	5.84
2024	Q3	121.02	6.24
2024	Q4	128.37	6.72

Lampiran 2. Output SPSS

Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

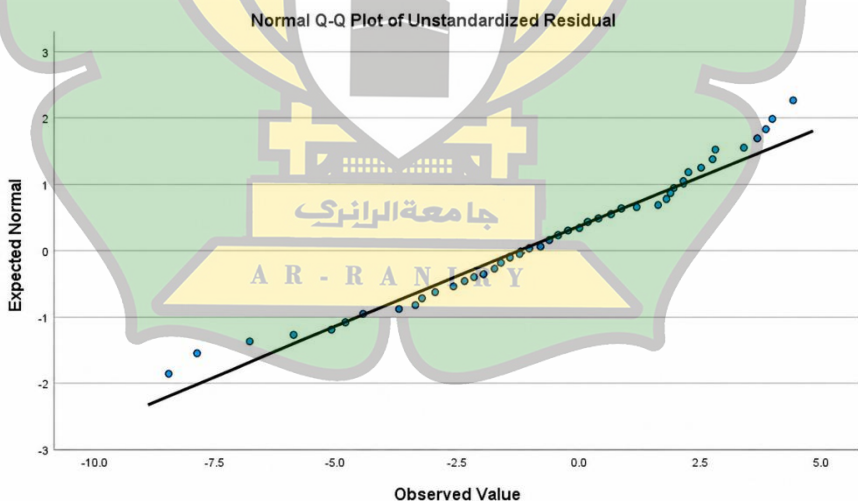
		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.38296404
Most Extreme Differences	Absolute	.194
	Positive	.145
	Negative	-.194
Test Statistic		.194
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.

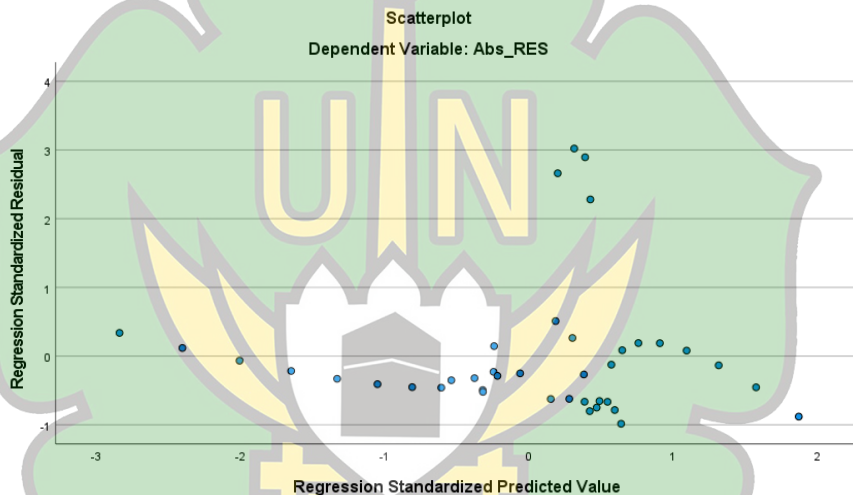


Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1 (Constant)	4.172	1.574		2.650	.012	
Pajak	-.031	.019	-.254	-1.618	.114	1.000 1.000

a. Dependent Variable: Abs_RES



Uji Regresi Linear

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1 (Constant)	1.264	2.111		.599	.553	
Pajak	.036	.026	.220	1.391	.172	1.000 1.000

a. Dependent Variable: Pert_Ekonomi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.220 ^a	.048	.023	2.70329

a. Predictors: (Constant), Pajak

b. Dependent Variable: Pert_Ekonomi

